

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2004

YLKI Sumbar Siapkan Tuntutan Hukum Terhadap PLN

PADANG (Suara Karya): Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar tengah mempersiapkan upaya hukum untuk menggiring PT PLN Persero ke lembaga peradilan guna mempertanggungjawabkan tindakan pemadaman listrik secara bergilir di daerah itu. "YLKI terus konsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar bisa mendapatkan bentuk dan langkah hukum yang tepat guna menggiring PLN ke pengadilan," ujar Pj Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar, Drs Dahnil Aswad, MSi di Padang, Sabtu.

Menurut dia, YLKI selalu membuka kesempatan pada PLN untuk menyelesaikan kerugian konsumen sebelum class action tersebut sampai ke lembaga peradilan.

Saat ini telah masuk member class sekitar 67 keluhan tertulis dan ratusan keluhan lisan masyarakat Sumbar dari sektor usaha rumah tangga, warung telekomunikasi, rental komputer, warung internet, bengkel las dan penjahit atau konveksi serta pengguna alat elektronik di rumah tangga.

Ia mengatakan, pemadaman listrik bergilir sejak bulan Mei hingga Juni dan kembali terjadi mulai 19 Agustus lalu sangat merugikan masyarakat kecil. Tiap pemadaman bergilir, PLN menghentikan kebutuhan listrik untuk 170 ribu pelanggan dari 700 ribu lebih pelanggan di Sumbar.

Apapun alasan PLN, pemadaman bergilir di Sumbar sangat tidak pantas karena kebutuhan dasar listrik untuk Sumbar dan Riau hanya sekitar 520 MW dan pembangkit di Sumbar mampu menghasilkan 550 MW.

Saat ini, timbul kesan PLN berusaha mengelabui masyarakat Sumbar dengan kondisi yang tidak diketahui pasti. Apalagi UU Kelistrikan memberi peluang pemerintah daerah untuk menentukan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD).

Sebelumnya, PLN Wilayah Sumbar melakukan pemadaman bergilir dengan alasan terjadi kerusakan di PLTU Sijantang, berkapasitas 2 X 100 MW dan terganggunya aktivitas PLTA Singkarak akibat musim kering. Memasuki bulan Agustus 2004, PLN kembali melakukan pemadaman bergilir guna menghemat pemakaian air di PLTA Singkarak dan PLTA Maninjau.

PLN Sumbar berupaya menurunkan hujan melalui pemuatan awan hujan mulai 7 Juli hingga 31 Juli dengan biaya sekitar Rp13 miliar, namun kemudian dihentikan karena kurang menunjukkan perkembangan yang berarti. (Ant)